

APLIKASI REGULASI PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Moh. Anif Arifani, Avid leonardo Sari, Rifkah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email : arifanianif661@gmail.com

Abstract

The problem of street children in the city of Bandung is no stranger to the people of Bandung. Moreover, the emergence of street children is caused due to family poverty. They survive in various ways such as singing, shining shoes, selling newspapers, begging and so on. Not infrequently the street children to commit crimes such as pickpocketing, stealing because of being pressured by economic circumstances. In this study, the authors used qualitative methods to reveal more in-depth, how the implementation of Law No. 23 of 2002 on the protection of children in the development of street children in the Department of Social Welfare and Poverty Bandung, which handles these street children. While the descriptive analysis of data collected through interviews with key informants and ordinary informants are not structured or open.

Keywords: *Child on The Street, Child Development*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk salah satu negara besar akan tetapi masih dalam taraf perkembangan atau dapat disebut juga dengan Negara berkembang. Tidak jauh berbeda dengan Negara-negara berkembang lainnya yang ada didunia, Indonesia juga sering menghadapi berbagai macam masalah yang kadang kala bisa menghambat kemajuan Negara tersebut. Salah satu yang paling menjadi sebuah masalah yang serius adalah masalah sosial di kota Bandung. Masalah yang kadang kala punya hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang sering kali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Anak merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sebuah keluarga, dimana anak tersebut menjadi cikal bakal penerus kehidupan keluarga

tersebut, namun pada kenyataannya di lingkungan kita banyak sekali hal yang mengkhawatirkan terjadi pada anak-anak.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan adalah laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bus, stasiun kereta api, dan taman kota.

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Kota Bandung. Anak-anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (mall, restoran dan lainnya) baik sebagai pedagang ataupun pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir mobil, kuli atau buruh pasar, ojeg payung, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Munculnya anak jalanan disebabkan karena faktor kemiskinan keluarganya. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktifitas di sektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya. Tidak jarang anak jalanan melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, mencuri, karena terdesak oleh keadaan ekonomi.

Tabel 1.1
Data Jumlah Anak Jalanan sebagai Pengemis di Kota Bandung
tahun 2012-2017

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK
1	2012	2.162 Orang
2	2013	1.821 Orang
3	2014	1.607 Orang
4	2015	1.520 Orang
5	2016	1.775 Orang
6	2017	1.654 Orang

Sumber : Data Dinsosnangkis Kota Bandung,2017

Dari jumlah data diatas menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, baik gelandangan ataupun pengemis belum menunjukkan pada angka peningkatan. Tetapi kini sudah lebih dari 80 persen berada di Kota Bandung. Hal ini dilihat dari perhitungan persentase anak jalanan dari tahun ke tahun, yaitu berawal dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Persentase pertahun anak jalanan di Kota Bandung ini dapat meningkat ataupun menurun. Biasanya persentase atau perhitungan pertahun anak jalanan adalah sekitar 20 persen atau bahkan sampai 40 persen pertahun. Berdasarkan data tersebut, hasilnya meningkat dan menurun sekitar 30 persen. Jadi, data dan hasil daripada jumlah persentase anak jalanan kurang lebih 80 persen dari perhitungan 100 persen yang menurun hanya sekitar 20 persen jadi hasil akhir daripada persentase anak jalanan di Kota Bandung adalah 80 persen. 80 persen tersebut berjumlah 10.539 anak jalanan di Kota Bandung. Apalagi dalam memasuki bulan ramadhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis semakin menjamur di setiap sudut kota Bandung mereka semakin nyaman dengan aktivitasnya dikarenakan pada bulan ramadhan banyak orang ditempat keramaian ataupun pengguna jalan memberikan santunan.

B. LANDASAN TEORI

Secara etimologis kata administrasi, berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad + ministrare. Ad artinya intensif, ministrare artinya to serve (melayani), membantu atau memenuhi. Jadi artinya melayani secara intensif. Kemudian terbentuk kata "administratio" (pimpinan), (Engkus, 2017 : 5). (b) Historikal dilihat dari asal usul kata bahwa administrasi berasal dari bahasa Belanda, pengertian administratie (administrasi dalam arti sempit) kegiatan tata usaha. Walaupun dalam bahasa Belanda sebenarnya mengandung arti yang luas, namun bangsa kita tidak diberi kesempatan memegang jabatan administratif, melainkan bersifat clerical work, sehingga timbulah istilah administrasi dalam arti tata usaha. Bahasa Inggris administrasi, Administration, dengan asal kata kerja to administer artinya to serve (melayani), to manage (mengelola), atau to direct (menggerakkan), dengan demikian dalam arti luas berarti mengelola dan memberikan pelayanan (Engkus, 2017 : 5).

Selanjutnya diuraikan beberapa definisi administrasi dari para ahli, (1)Administration may be defined as the organization ad direction of human and material resources to achieve desired ends. (John F Pfiffner, 1960). (Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya material dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan).

(2)Administration is conceived as the necessary activities of these individuals (executive) in an organization who are change with ordering, forwarding, and facilitating the associate efforts of of group of individuals brought together to realize certain defined purpose. (Ordway Tead,1954). (Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu (eksekutif) yang penting dalam suatu organisasi yang merubah dengan teratur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama kelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan).

Menurut Engkus (2017 : 8), ditinjau dari aspek kegiatan administrasi terdapat 4 macam, yaitu :(1)Administrator (orang yang menetapkan).(2) Manajer

(orang yang mengendalikan/memimpin usaha) (3) Staf ahli (membantu pemikiran untuk manajer).(4) Worker (orang yang langsung bekerja). Sedangkan dari ciri-ciri administrasi dapat dilihat dari 3 aspek, (Engkus, 2017 :8) yaitu sebagai berikut :

(1) Sekelompok orang. Adanya orang-orang yang bekerjasama dalam wadah organisasi. (2) Adanya kerjasama. Dalam administrasi kerjasama merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan bersama.(3) Tujuan, merupakan harapan, sasaran, target, atau pencapaian akhir bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Administrasi Publik, menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (1) Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. (2) Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Kebijakan Publik, secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan memiliki bermacam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan yang jelas tentang kebijakan. Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: "policy" dan "publik". Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli.

Kebijakan Sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Dimensi sosial ini menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka

yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (*disadvantaged group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*).

Perlindungan Sosial, hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai institusi dan negara. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para ahli.

Anak Jalanan jalanan menurut peserta Lokakarya Nasional Anak Jalanan dengan Departemen Sosial sebagai penyelenggara adalah “Anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya”. (Departemen Sosial, 2006: 22).

C. PEMBAHASAN

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Di Indonesia hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, secara rinci dan jelas telah diatur mengenai langkah-langkah pembinaan yang sejatinya harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung (*Dinsosnangkis*) untuk menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen

yang semakin bertambah ini. Untuk memperoleh gambaran secara detail mengenai pembinaan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Kota Bandung, berikut datanya.

1. Strategi Pembinaan

Dengan meruntut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Bandung, dapatlah dinyatakan bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesungguhnya dapat dipetakan (dikelompokkan) ke dalam empat (4) bentuk pembinaan. Keempat bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah :

- a. Pembinaan, yang mencakup tiga langkah pembinaan yaitu, pembinan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial.
- b. Pemberdayaan
- c. Bimbingan Lanjutan
- d. Partisipasi Masyarakat.

2. Langkah Pembinaan

Sesungguhnya langkah pembinan ataupun penanganan terhadap anak jalanan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Semenjak tahun 2008, Pemerintah Kota Bandung telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan di wilayah kota Bandung, sebagai perwujudan amanah dari peraturan perundangan berupa Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembinaan anak jalanan gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Bandung.

3. Pembinaan Pencegahan

Dalam melakukan pembinaan pencegahan, Dinsosnangkis melakukan pendataan terlebih dahulu di lokasi yang rawan anak jalanan, gepeng dan

pengamen seperti di perempatan lampu merah, di bawah fly over, dsb. Selain itu, Dinsosnangkis juga terbantu dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai keberadaan anak jalanan, gepeng dan pengamen di daerah sekitarnya masing-masing.

D. SIMPULAN

Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, belum mampu diterapkan secara efektif karena dari tujuan dan sasaran dari peraturan Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinsosnangkis sendiri masih terbilang kurang.

Masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anak jalanan atau gelandangan di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, M. A. (2010). Model Pengembangan Dakwah Berbasis Budaya Lokal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(15), 849-878.
- Arifani, M. A. (2015). Eksistensi Budaya Lokal sebagai Model Pengembangan Dakwah: Pendekatan Sosiologis. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(12), 193-214.
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 36-57.
- Engkus, E. (2015). Dampak Komitmen Organisasional Melalui Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Wilayah Metropolitan Bandung. *lib. uinsgd. ac. id*, 1-133.

- Engkus, E. (2016). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara)*.
- Engkus, E. (2016). *Kajian Naskah Akademik Tentang Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dan Pengendalian Tenaga Asing Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat. Kajian Naskah Akademik Tentang Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dan Pengendalian Tenaga Asing Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat, 1-19.*
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). *Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 101-120.*
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 24-42.*
- Sampurna, R. H. (2017). *Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Di Kabupaten Bandung. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 1-11.*
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 160-173.*
- Sari, A. L. (2017). *The Role Of Social Workers In The Development Of Tourism Villages. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.*
- Siagian, Sondang P. (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.